
RETRIBUSI - JASA UMUM

2016

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2016 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

- ABSTRAK:
- a. Peraturan ini dibentuk untuk menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 P/Hum/2014 terhadap Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 38A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012, dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan Bab VI Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012.
 - b. Peraturan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tujuan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PERPRES Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014; Keputusan menteri Perhubungan No. KM.66 Tahun 1993; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 1 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 16 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan ini berisi tentang prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua peraturan yang dibuat sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan terorganisir dengan baik.

CATATAN:

- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016
- Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku